BAB V

PENUTUP

1.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian tentang Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Korupsi Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB Tahun 2017), dapat ditarik kesimpulan yang merupakan hasil dan pembahasan pada bab IV yaitu sebagaiberikut:

1. Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Korupsi Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB Tahun 2017). Dalam hal *The Agency Model Of Corruption* pada poin *asimetri information* bahwa tidak ditemukan miskomunikasi atau tumpang tindih informasi antara dinas pertanias dan perkebunan NTB dengan kedua PT pengadaan bibit jagung karena dalam kasus korupsi bibit jagung anggaran tahun 2017 ini sudah terencanan dari awal karena kepala dinas dan kedua PT yang terlibat sudah merencanakan untuk melakukan korupsi. Dari berbagai pola korupsi yang dilakukan yaitu dengan perencanaan penunjukan rekan atau PT yang menyediakan barang sampai dengan penyaluran anggarannya. Dengan berbagai modus memalsukan sertifikat, menduplikat sertifikat, menggunakan sertifikat bodong sampai dengan pengadaan bibit jagung oplosan yang merugikan petani jagung di Nusa Tenggara Barat. Dengan berbagai motivasi korupai yang dilakukan Kepala Dinas

Pertanian dan Perkebunan NTB dan kedua PT yang terlibat untuk memperkaya diri dan demi kepuasan pribadi atau kelompok.

2. Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Korupsi Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB Tahun 2017). Dalam hal *corruption and internal market* yaitu keterlibatan perusahaan atau pasar dalam kasus korupsi bibit jagung tahun anggaran 2017 melibatkan dua PT yaitu PT SAM dan PT WBS yang mengatur pola-pola terjadinya korupsi sehingga Negara mengalami kerugian akibat korupsi yang dilakukanoleh kedua PT tersebut dalam pelaksanaan pengadaan bibit jagung tahun anggaran 2017.

1.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian yang penulis rangkum tentang Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat (Studi Kasus Korupsi Pengadaan Bibit Jagung Di Dinas Pertanian Dan Perkebunan NTB Tahun 2017), penulis dapat merekomendasikan beberapa saran-saran sebagaiberikut:

1. Memperketat peraturan terkait penggunaan anggaran disetiap Dinas atau OPD agar penggunaan anggaran tidak salah digunakan oleh pejabat public terkait.

2. Melakukan pengawasan secara maksimal terkait pelaksanaan setiap program-program yang melibatkan anggaran Negara baik dari pemerintah maupun masyarakat harus terlibat aktif dalam pelaksanaan

pengawasan agar tidak ada kesempatan maupun ruang dalam melakukan korupsi.

3. Memperkuat aturan-aturan terkait tentang penyalahgunaan kekuasaan agar tidak terjadi korupsi-korupsi lainya.
4. Memberikan hukuman seberat-beratnya untuk pelaku korupsi agar memiliki efek jera dan sebagai bahan pembelajaran untuk pejabat publik lainnya agar tidak melakukan korupsi maupun penyelewengan lainya.
5. Kepada peneliti selanjutnya diharapkan agar dapat mengembangkan penelitian ini untuk memperluas pengetahuan tentang pola-pola korupsi.

DAFTRA PUSTAKA

Undang- Undang / Peraturan Pemerintah

Undang-Undang No 31 Tahun 1991 Jo UU No 20 Tahun 2001. Tentang Anti Korupsi

Undang-Undang Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP Dan Ata U Pasal 3 Jo Pasal 18. Tentang Pemberantasan Pidana Korupsi

Undang-Undang Pasal 55 Ayat 1 Ke-1 KUHP. Tentang Pemberantasan Tindak Pidanan Korupsi

Skripsi/Tesis/Disertasi :

Muhammad Nalar Khair 2014**,** *Analisis Pola Korupsi Di Lembaga Pemerintah Indonesia (Studi Kasus Putusan Incracht Tindak Pidana Korupsi Di Lembaga)***,**Universitas Diponegoro Malang

Zainal abidin 2013, *Pola Prilaku Para Koruptor Di Indonesia Dan Pola Penangan Kasus-Kasus Korupsi Olek Komisi Pemberantasan Korupsi(KPK),* Universitas Pedjajaran Jatinangor

Fathur rahman 2018, *Pola Jaringan Korupsi di Tingkat Pemerinta Desa(Studi Ka sus Korupsi DD dan ADD Tahun 2014-2015 di Jawa Timur),* Universitas Brawijaya Malang

Amirudin 2012, *Analisa Pola Pemberantasan Korupsi Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintahan,*KriminologiIndonesiaVol.8No.1Mei2012:026–037

Didik Setiawan 2014, *Pola Komunikasipolitisi Dalam Prilaku Korupsi Di Lembaga Legislative (Studi Kasus Pola Komunikasi Angelina Sondakh),* Universitas Negri Sarif Hidayatullah Jakarata

Asia Mahardhika 2018, *Analisa pola-pola pencegahan korupsi melalui sosialisasi bentuk seminar,koferensi, dan diskusi di yogyakarta,* Universitas Islam Yogyakarta

Wiwiek Prihandini, 2013, *Pola-pola korupsi di Indonesia tahun 2012,* Institud Perbanas Yogyakarta

Agus Adhari 2017, *pola korupsi di perguruan tinggi Suwasta,* Universitas Pembangunan Panca Budi Medan Sumatera Utara

LAMPIRAN

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH MATARAM

FAKULTAS ILMU SOSIAL DAN ILMU POLITIK

JL. K. H. Ahmad Dahlan No.1 Telp. (0370) 633723 Mataram

KARTU KONSULTASI SKRIPSI

Pola-Pola Korupsi Di Nusa Tenggara Barat

(Studi Kasus Korupsi Pengadaan Bibit Jagung di Dinas Pertanian dan Perkebunan NTB Tahun 2017)

NamaMahasiswa : Imansyah

NIM : 217130071

Program Studi : IlmuPemerintahan

Pembimbing I : Drs. H. Darmansyah, M.Si

NO	Hari / Tanggal	Materi	Paraf Pembimbing
1	1/2-2022	→ Sistematisasi Landasan Teori	
2		→ Pembahasan tiap pola-pola korupsi yang di perkara	
3	6/2-2022	Acc ujian Skripsi	

Mengetahui

Ketua Prodi Ilmu Pemerintahan

(Ayatullah Hadi, S.IP., M.I.P)
NIDN. 0816057902

Dosen Pembimbing I

(Drs. H. Darmansyah, M.Si)
NIDN. 0008075914

PTSP
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
KEJAKSAAN TINGGI NUSA TENGGARA BARAT
MITHA
DINI

DAK PIDANA KHU
AAN TINGGI NUSA TENGGAR

TAMU
3